



# LAPORAN KEBERLANJUTAN

## TAHUN 2024

PT. TEMPO UTAMA FINANCE

## DAFTAR ISI

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Strategi keberlanjutan .....   | 1  |
| 2.   | Ikhtisar aspek keberlanjutan 2022-2024   |    |
| 2.1. | Aspek ekonomi .....  | 3  |
| 2.2. | Aspek sosial .....   | 3  |
| 2.3. | Aspek lingkungan hidup .....   | 3  |
| 3.   | Profil Perusahaan  |    |
| 3.1. | Visi misi berkelanjutan .....  | 4  |
| 3.2. | Sekilas Perusahaan .....   | 5  |
| 3.3. | Skala organisasi .....   | 5  |
| 3.4. | Kegiatan usaha dan produk/jasa pembiayaan .....  | 6  |
| 3.5. | Keanggotaan dalam Asosiasi & Badan .....   | 7  |
| 4.   | Penjelasan Direksi   |    |
| 4.1. | Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi<br>keberkelanjutan .....                           | 8  |
| 4.2. | Penerapan keuangan berkelanjutan .....   | 9  |
| 4.3. | Strategi pencapaian target .....   | 10 |
| 5.   | Tata kelola berkelanjutan  |    |
| 5.1. | Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan<br>keuangan berkelanjutan .....                      | 11 |
| 5.2. | Pengembangan kompetensi .....  | 12 |
| 5.3. | Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan keuangan<br>berkelanjutan .....                              | 13 |
| 5.4. | Pendekatan pemangku kepentingan .....  | 15 |
| 5.5. | Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh<br>terhadap penerapan keuangan berkelanjutan ..... | 16 |
| 6.   | Kinerja berkelanjutan  |    |
| 6.1. | Membangun budaya berkelanjutan .....   | 17 |
| 6.2. | Kinerja ekonomi .....  | 17 |
| 6.3. | Kinerja sosial .....   | 18 |
| 6.4. | Kinerja lingkungan hidup .....   | 20 |
| 7.   | Referensi Peraturan OJK .....  | 22 |

## 1. Strategi keberlanjutan

Sampai akhir tahun 2024, risiko ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap kondisi geopolitik dan perekonomian global semakin meningkat yang ditandai dengan masih berkecamuknya konflik antar dan/atau dalam negara pada beberapa kawasan rawan konflik. Selain itu, peningkatan risiko ketidakpastian ini juga disebabkan karena terjadinya dinamika perpolitikan di Amerika Serikat (“AS”) dan beberapa negara lainnya serta kekhawatiran terjadi perang dagang antar negara-negara besar. Kondisi ini diproyeksikan akan mendorong pelemahan ekonomi global dan nasional. Pemerintahan Donald Trump dari AS yang baru dilantik pada akhir tahun 2024 juga telah memutuskan untuk keluar dari kesepakatan *Paris Agreement*, dengan demikian isu perubahan iklim dan pemanasan global tetap menjadi isu global dan sangat penting sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dari masing-masing negara yang telah menyepakatinya.

Republik Indonesia (“RI”) telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang Undang (“UU”) No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change* yang menyatakan komitmen RI untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai regulator Sektor Jasa Keuangan (“SJK”) telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung dan mendorong SJK untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau jasa di sektor keuangan secara berkelanjutan. Setelah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap I (2015 – 2019), OJK melanjutkan inisiatif dengan mengeluarkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap II (2021 – 2025) untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola di RI. Selain itu pada tahun 2024, OJK juga telah melakukan transformasi Taksonomi Hijau Indonesia menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (“TKBI”) yang pada tahap awal difokuskan pada sektor energi dan akan dilanjutkan pada sektor lainnya.

PT. Tempo Utama Finance (“Perusahaan”) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan di wilayah RI juga mempunyai komitmen melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara seimbang serta melaksanakan tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik. Komitmen pelaksanaan ini adalah kontribusi Perusahaan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan (“KB”).

Melalui visi menjadi perusahaan pembiayaan yang profesional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dan misi menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, Perusahaan senantiasa mengupayakan komitmen penerapan KB dapat diwujudkan dalam aktivitas usahanya.

Dalam pelaksanaan tersebut, Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK (“POJK”) No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Lebih lanjut, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) tahun 2020 – 2024 yang menjadi panduan bagi seluruh pihak internal Perusahaan dalam melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan. RAKB 2020 – 2024 tersebut mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Lampiran I POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan penerapan KB tersebut tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan strategi untuk mencapai kinerja ekonomi saja namun juga mempertimbangkan pencapaian kinerja sosial dan lingkungan hidup dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik. Perusahaan menyadari bahwa strategi penerapan KB yang berimbang akan memberikan dampak yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 pasal 7, Perusahaan telah menyusun prioritas penerapan KB yang telah dituangkan dalam RAKB tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Prioritas pertama: pengembangan kapasitas internal Perusahaan yang dilaksanakan pada periode tahun 2020 – 2021;
- (2) Prioritas kedua: penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan/atau *Standard Operating Procedure* (“SOP”) yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan dilaksanakan pada periode tahun 2022 – 2023;
- (3) Prioritas ketiga: pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk implementasi produk/jasa pembiayaan yang selaras keuangan berkelanjutan dilaksanakan pada periode tahun 2024.

## 2. Ikhtisar aspek keberlanjutan tahun 2022 – 2024

### 2.1. Kinerja aspek ekonomi

| Deskripsi (Dalam Rp. Juta)  | 2024    | 2023    | 2022    |
|---|---------|---------|---------|
| 1 Total aset  | 112.550 | 111.408 | 109.341 |
| 2 Piutang pembiayaan  | 58.737  | 49.053  | 56.576  |
| 3 Total pendapatan  | 6.819   | 7.268   | 5.573   |
| 4 Laba bersih   | 1.236   | 2.154   | 1.046   |
| 5 Data produk/jasa pembiayaan ramah lingkungan                          | N/A     | N/A     | N/A     |
| 6 Data pelibatan pihak lokal dalam proses bisnis keuangan berkelanjutan | N/A     | N/A     | N/A     |

### 2.2. Kinerja aspek sosial

| Deskripsi (dalam %)   | 2024    | 2023    | 2022   |
|---|---------|---------|--------|
| 1 Komposisi SDM berdasarkan pendidikan                                    | 100,00  | 100,00  | 100,00 |
| a. Sekolah Menengah   | -       | 10,00   | 11,11  |
| b. Diploma 3 (D-3)  | 30,00   | 30,00   | 33,33  |
| c. Sarjana Strata 1 (S-1)   | 70,00   | 60,00   | 55,56  |
| d. Pasca Sarjana (S-2)  | -       | -       | -      |
| 2 Total pelatihan & webinar/seminar (kali)                                | 19      | 17      | 12     |
| a. Pelatihan/Training   | 9       | 3       | -      |
| b. Webinar/Seminar  | 10      | 14      | 12     |
| 3 Rasio SDM terhadap jumlah pelatihan/training dan Webinar/Seminar (kali) | 1,58    | 1,59    | 1,11   |
| 4 Program Literasi Keuangan   |         |         |        |
| a. Jumlah kegiatan literasi keuangan (kali)                               | 1       | 1       | 1      |
| b. Metode kegiatan literasi keuangan                                      | Offline | Offline | Online |
| c. Jumlah peserta literasi keuangan (orang)                               | 72      | 35      | 40     |

### 2.3. Kinerja aspek lingkungan hidup

| Deskripsi                                    | 2024   | 2023   | 2022   |
|--|--------|--------|--------|
| 1 Total energi listrik (KwH)                 | 5.876  | 6.764  | 8.151  |
| 2 Total pemakaian kertas (lembar)            | 56.943 | 63.404 | 56.892 |
| 3 Estimasi emisi GRK yang dihasilkan (KgCO2) | 4.260  | 4.904  | 5.910  |

### **3. Profil Perusahaan**

Perusahaan (d/h. PT Artha Rahardja Sakti Leasing) didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1983 berdasarkan Akta Nomor 199 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2004.HT. 01.01.TH.84 tanggal 30 Maret 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 tanggal 12 Juni 1984, Tambahan Nomor 578. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 dihadapan Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto Sarjana Hukum, Notaris bertempat di Jakarta, dilakukan seluruh perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar dimaksud telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-45434.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan telah mengalami perubahan beberapa kali dengan akta terakhir lainnya yang termuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Juli 2020 yang telah dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2020, Nomor: AHU-AH.01.03-0316653.

#### **3.1. Visi Misi Berkelanjutan**

Dalam rangka menjalankan komitmen penerapan keuangan berkelanjutan, Perusahaan menyusun dan menetapkan visi misi berkelanjutan. Adapun visi misi keberlanjutan adalah sebagai berikut:

**Visi:**

Menjadi Perusahaan Pembiayaan professional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

**Misi:**

Menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

### 3.2. Sekilas Perusahaan

Berikut ini informasi mengenai Perusahaan:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nama Perusahaan</b>     | PT. Tempo Utama Finance   |
| <b>Alamat Kantor Pusat</b> | Tempo Scan Tower<br>Jln. HR Rasuna Said Kav.3-4 Jakarta 12950                   |
| <b>No. Telepon</b>         | (021)29667879   |
| <b>E-mail</b>              | tufjkt@thetempogroup.com  |
| <b>Website</b>             | <a href="http://www.tempoutamafinance.com">http://www.tempoutamafinance.com</a> |

### 3.3. Skala Organisasi

Berikut ini informasi mengenai skala organisasi:

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <b>Total Aset</b> (Rp. Juta)                                 |   | 112.550 |
| <b>Jumlah Kantor</b>   | 1 (Satu) Kantor Pusat merangkap kantor operasional di Jakarta<br>Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang maupun Kantor Selain Kantor Cabang di luar kota Jakarta |         |
| <b>Area Operasional</b>                                      | DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur & Lampung   |         |
| <b>Komposisi karyawan menurut pendidikan (%)</b>             | S3  | -       |
|  | S2  | -       |
|  | S1  | 70,00   |
|  | D3  | 30,00   |
|  | SMA   | -       |
| <b>Komposisi karyawan menurut jabatan (%)</b>                | Direksi   | 20,00   |
|  | Manager   | 20,00   |
|  | Supervisor  | 30,00   |
|  | Non staff   | 30,00   |
| <b>Komposisi karyawan menurut usia (%)</b>                   | > 60 tahun  | 10,00   |
|  | > 50 tahun  | 20,00   |
|  | > 40 tahun  | 30,00   |
|  | > 30 tahun  | 20,00   |
|  | > 20 tahun  | 20,00   |
| <b>Komposisi karyawan menurut gender (%)</b>                 | Pria  | 40,00   |
|  | Wanita  | 60,00   |
| <b>Komposisi karyawan menurut status ketenagakerjaan (%)</b> | Tetap   | 90,00   |
|  | Kontrak   | 10,00   |

### 3.4. Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa Pembiayaan

Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh OJK. Dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan menawarkan produk/jasa pembiayaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 46 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Perusahaan Modal Ventura.

Berdasarkan regulasi diatas, jenis dan skema pembiayaan yang dilaksanakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

| <b>Tipe Pembiayaan</b>        | <b>Skema</b>   |
|-------------------------------|--|
| <b>Pembiayaan Investasi</b>   | Sewa Pembiayaan  |
|                               | Jual dan Sewa-balik                                    |
|                               | Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang |
|                               | Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang  |
|                               | Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran            |
|                               | Pembiayaan proyek                                      |
|                               | Pembiayaan Infrastruktur                               |
|                               | Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK                  |
| <b>Pembiayaan Modal Kerja</b> | Jual dan Sewa-balik                                    |
|                               | Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang |
|                               | Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang  |
|                               | Fasilitas modal usaha                                  |
|                               | Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK                  |
| <b>Pembiayaan Multiguna</b>   | Sewa Pembiayaan  |
|                               | Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran            |
|                               | Fasilitas dana   |
|                               | Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK                  |

### 3.5. Keanggotaan dalam Asosiasi dan Lembaga

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan telah bergabung dalam Asosiasi dan Lembaga-lembaga pendukung yaitu sebagai berikut:

| Nama Asosiasi/Lembaga   | Keterangan   |
|---|--|
| <br>Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia | - Bergabung sejak tahun 1986<br>- Posisi sebagai Anggota |
| <br>Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa | - Bergabung sejak tahun 2017<br>- Posisi sebagai Anggota |
| <br>Rapindo Asset Registry                   | - Bergabung sejak tahun 2023<br>- Posisi sebagai Anggota |

## **4. Penjelasan Direksi**

### **4.1. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberlanjutan**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dinamika yang terjadi pada geopolitik dan ekonomi global menyebabkan meningkatnya risiko ketidakpastian. Kondisi ini dapat mempengaruhi perekonomian nasional secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi RI tahun 2024 berdasarkan data Biro Pusat Statistik (“BPS”) mencapai sebesar 5,03% atau lebih rendah 0,02% dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Realisasi pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan kondisi yang cukup stabil namun dengan trend yang menurun.

Tantangan ekonomi makro tersebut dapat mempengaruhi sektor riil utamanya sektor manufaktur dan sektor produktif lainnya. Sektor produktif ini menjadi fokus Perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan melalui proses yang memadai sehingga dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan dalam kondisi sehat dan memberikan manfaat yang optimal. Pengklasifikasian sektor usaha yang terkait dengan keuangan berkelanjutan juga masih menjadi tantangan dan kedepan perlu terus dipelajari dan dikembangkan secara lebih mendalam.

RAKB tahun 2024 masih merupakan tahap lanjutan dalam proses penerapan keuangan berkelanjutan dimana fokus Perusahaan adalah memperkuat dan meningkatkan kapasitas/kemampuan pihak internal Perusahaan. Ini masih sejalan dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 dimana terdapat 3 (tiga) prioritas utama yaitu (1) Pengembangan kemampuan internal dan Sumber Daya Manusia (“SDM”); (2) Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau regulasi internal; dan (3) Pengembangan produk/jasa pembiayaan yang terkait keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas internal ini Perusahaan telah melakukan beberapa langkah penting seperti melanjutkan implementasi dan pengembangan sistem Teknologi Informasi (“TI”) yang mendukung kegiatan operasional, melakukan evaluasi struktur organisasi, pengkinian regulasi internal serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dengan mengalokasikan sumber daya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.

Melalui pendekatan strategis diatas, maka diharapkan seluruh pihak internal Perusahaan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan secara baik dan tersedianya infrastruktur organisasi yang memadai sehingga penerapan KB dapat dilaksanakan secara optimal.

## 4.2. Penerapan keuangan berkelanjutan

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan menetapkan target penyaluran pembiayaan baru untuk keperluan produktif pada sektor ekonomi yang telah dilayani dan dipahami dengan baik. Dan sebagai bagian dari diversifikasi penyaluran pembiayaan baru, Perusahaan secara bertahap juga menyalurkan pembiayaan baru untuk keperluan konsumtif.

Realisasi kinerja ekonomi dapat dilihat dari realisasi total aset sampai akhir tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 112.550 juta atau naik 1,03% dibandingkan realisasi total aset tahun 2023. Pada periode yang sama, realisasi piutang pembiayaan mencapai Rp. 58.737 juta atau naik 19,74% dibanding realisasi piutang pembiayaan tahun 2023. Dari laporan laba rugi, tercatat realisasi total pendapatan tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 6.819 juta atau turun 6,18% dibandingkan realisasi total pendapatan tahun 2023. Pada periode yang sama realisasi laba bersih mencapai Rp. 1.236 juta atau turun 42,62% dibanding realisasi laba bersih tahun 2023. Realisasi kinerja aspek sosial pada tahun 2024 menunjukkan posisi yang stabil dalam hal komposisi SDM. Realisasi karyawan Perusahaan masih didominasi memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (“S1”). Realisasi pelatihan dan/atau seminar/*webinar* yang telah dilakukan oleh karyawan sepanjang tahun 2024 sebanyak 19 sesi atau mengalami kenaikan 11,76% dibanding realisasi pelatihan dan/atau seminar/*webinar* yang dilakukan tahun 2023. Umumnya pelatihan dan seminar yang diikuti dilakukan secara *offline* sedangkan beberapa *webinar* telah dilakukan secara *online*. Salah satu realisasi kinerja sosial yang juga telah dilakukan tahun 2024 adalah kegiatan Literasi Keuangan (“LK”). Perusahaan memandangi kegiatan LK adalah bagian dari partisipasi Perusahaan dalam pemberdayaan dan meningkatkan literasi keuangan untuk masyarakat. Realisasi kegiatan literasi keuangan pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan tema “Menjadi Konsumen yang Cerdas dalam Memanfaatkan Fasilitas Dana Pembiayaan”. Kegiatan literasi keuangan bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan perusahaan pembiayaan sebagai solusi untuk kebutuhan dana pembiayaan dalam strategi pengelolaan keuangan. Kegiatan LK ini dilaksanakan secara *offline* dan melibatkan siswa/wi Sekolah Cakra Buana Depok, Jawa Barat. Kegiatan LK berjalan sukses, lancar dan mendapat tanggapan yang positif dari pihak sekolah dan para partisipan yang merupakan peserta didik sekolah tersebut. Jumlah partisipan yang hadir dan mengikuti kegiatan sebanyak 72 orang.

Sedangkan kinerja aspek lingkungan hidup dapat dilihat dari realisasi jumlah pemakaian energi listrik dan pembelian kertas sepanjang tahun 2024 yang digunakan untuk kegiatan operasional. Realisasi jumlah pemakaian energi listrik sepanjang tahun 2024 sebesar 5.876 *Kilowatt/Hour* (“KwH”) atau turun 13,13% dibanding realisasi pemakaian listrik tahun 2023. Dari realisasi jumlah KwH pemakaian listrik tersebut, Perusahaan mengupayakan pengukuran estimasi emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”) yang dihasilkan dari pemakaian energi listrik tersebut dengan menggunakan referensi dari Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi GRK Sektor Berbasis Energi yang dikeluarkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (“Bappenas”) tahun 2014. Dengan *benchmark* ini, estimasi emisi GRK yang dihasilkan sepanjang tahun 2024 sebesar 4.260 kgCO<sub>2</sub>/KwH atau turun 13,13% dibanding estimasi emisi GRK yang dihasilkan tahun 2023. Realisasi pembelian kertas yang dilakukan sepanjang tahun 2024 sebanyak 56.943 lembar atau turun 10,19% dibanding realisasi pembelian kertas tahun 2023. Penurunan realisasi pemakaian energi listrik, estimasi emisi GRK yang dihasilkan dan pembelian kertas tersebut menunjukkan inisiatif seluruh pihak dalam Perusahaan dalam penghematan penggunaan energi listrik dan kertas. Meski estimasi emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan operasional kantor tersebut relatif masih kecil, namun Perusahaan tetap memberikan komitmen untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi GRK yang juga merupakan target *Paris Agreement*.

### **4.3. Strategi pencapaian target**

Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada tatanan global dan dampaknya terhadap tatanan pada tingkat regional dan domestik perlu diwaspadai. Tahun 2025 merupakan tahun pertama Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pemerintahan RI dan diperkirakan akan menghadapi banyak tantangan.

Memperhatikan hal ini, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan rencana kegiatan usaha pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensinya agar tetap dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan dalam kondisi yang sehat. Perusahaan masih akan fokus pada pasar korporasi dan menyalurkan pembiayaan baru untuk keperluan produktif pada beberapa sektor ekonomi potensial yang sudah dijalankan dan dipahami dengan baik. Penyaluran pembiayaan untuk keperluan konsumtif juga akan ditingkatkan melalui pembiayaan berbasis digital.

Penerapan tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik yang sudah dijalankan akan dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya termasuk juga melanjutkan pengembangan sistem TI yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kapasitas Perusahaan. Proses pengkinian regulasi internal dilakukan secara paralel dan disesuaikan dengan pengembangan sistem TI. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM juga tetap menjadi prioritas dimana Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelatihan/training yang sesuai kebutuhan dari Lembaga/Institusi yang mempunyai kompetensi.

Sedangkan terkait efisiensi penggunaan energi listrik, Perusahaan akan melanjutkan pola kerja hemat energi listrik dan penggunaan produk-produk hemat energi listrik sebagai upaya dalam rangka penurunan emisi GRK dari kegiatan usaha yang dilakukan.

## **5. Tata Kelola Berkelanjutan**

### **5.1. Tugas dan tanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan**

Penerapan tata kelola berkelanjutan didasarkan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan telah menyusun dan menetapkan struktur tata kelola berkelanjutan yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan masing-masing Satuan Kerja. Infrastruktur tata kelola berkelanjutan adalah regulasi internal, sistem informasi dan fungsi/tugas pokok masing-masing Satuan Kerja dalam struktur organisasi.

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ tata kelola berkelanjutan menjalankan fungsi pengawasan dan juga sebagai penasihat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha pembiayaan yang dilaksanakan Direksi telah sesuai dengan tujuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga merupakan organ tata kelola berkelanjutan yang menjalankan fungsi representasi dan manajerial yang memegang peran utama dalam kegiatan operasional Perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan strategi dan inisiatif jangka pendek maupun jangka panjang dapat dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direksi didukung oleh Satuan Kerja yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penerapan KB, Perusahaan menyusun dan menetapkan RAKB tahun 2020-2024. Fungsi dan peran supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan RAKB tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Dan Direksi juga menetapkan dan menugaskan

Satuan Kerja Pemasaran sebagai Satuan Kerja pelaksana keuangan berkelanjutan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun RAKB;
- 2) Melaksanakan program penerapan RAKB;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja lainnya terkait pelaksanaan RAKB dan penyusunan Laporan Berkelanjutan;
- 4) Menyusun Laporan Keberlanjutan;
- 5) Bertanggung jawab kepada Direksi atas penerapan RAKB;

Tugas dan tanggung jawab fungsi Kepatuhan dalam tata kelola berkelanjutan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja lainnya terkait penyusunan dan atau pengkinian regulasi internal seperti pedoman dan SOP termasuk juga koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan Laporan Berkelanjutan. Fungsi Kepatuhan juga memberikan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap penerapan KB. Sedangkan Internal Audit sebagai pihak yang independen dalam organisasi Perusahaan berfungsi melakukan evaluasi dan penilaian mengenai kegiatan operasional terhadap prinsip penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan manajemen risiko melalui pendekatan yang sistematis sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan juga sekaligus memperbaiki operasional Perusahaan.

## 5.2. Pengembangan kompetensi

Komitmen Perusahaan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sepanjang tahun 2024 telah dilakukan dengan mengikuti berbagai Seminar/Webinar yang dilaksanakan oleh OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (“APPI”) dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang berkompeten dengan berbagai topik yang dapat mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dengan perincian sebagai berikut:

| Kelompok Topik                                    | Kategori        | #Partisipan karyawan |
|---|-----------------|----------------------|
| Economic Outlook 2025                             | Seminar/Webinar | 2                    |
| Carbon Trading & It's Implementation in Indonesia | Seminar/Webinar | 1                    |
| Transformasi Teknologi                            | Seminar/Webinar | 2                    |
| Tantangan dalam Sektor Jasa keuangan              | Seminar/Webinar | 2                    |
| APU PPT & PPPSPM                                  | Seminar/Webinar | 2                    |
| Implementasi Core Tax                             | Seminar/Webinar | 1                    |
| Perlindungan Konsumen                             | Training        | 2                    |
| Dashboard & Power BI                              | Training        | 2                    |
| Training Internal Audit                           | Training        | 1                    |
| Financial Statement Analysis                      | Training        | 2                    |
| Sertifikasi Manajemen Risiko                      | Training        | 2                    |
| <b>Grand Total</b>                                |                 | <b>19</b>            |

### 5.3. Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan KB

Penerapan KB dengan menerapkan manajemen risiko berdasarkan POJK No. 44/POJK. 05/2020 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank meliputi penerapan 4 (Empat) pilar manajemen risiko yaitu:

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;
- 4) Sistem pengendalian internal.

Perusahaan telah menyusun dan menetapkan struktur tata kelola dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan penugasan kepada Satuan Kerja Pemasaran sebagai pelaksana penerapan KB. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas potensi risiko yang akan dihadapi dalam penerapan KB juga dilakukan. Pengkinian regulasi internal seiring dengan dikeluarkannya regulasi baru dari Regulator. Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, Perusahaan telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* terhadap pasar yang menjadi target penyaluran pembiayaannya. Proses bisnis juga telah terdapat segregasi/pembagian tugas yang memadai mulai dari proses permohonan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pemantauan kualitas piutang pembiayaan.

Penerapan *1st Line of Defense* dalam sistem pengendalian internal pada masing-masing Satuan Kerja telah didukung dengan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai *2nd Line of Defense* yang menjadi mitra kerja bagi Satuan Kerja terkait dalam melakukan pemantauan risiko. Fungsi Internal Audit sebagai *3rd Line of Defense* juga telah berjalan untuk memastikan seluruh regulasi internal telah diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan benar oleh seluruh pihak dalam internal Perusahaan dan juga sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

Terkait pengendalian *fraud* dan strategi *anti fraud*, Perusahaan mengacu pada POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya pada Bab XII mengenai pengendalian *fraud* dan strategi *anti fraud*. Perusahaan telah membentuk Unit Kerja Anti Fraud (“UKAF”) sebagai salah satu upaya preventif aktif untuk mengendalikan/mengurangi potensi kejadian *fraud* dalam kegiatan operasional Perusahaan termasuk juga penyusunan Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan Pengendalian *Fraud* (“P2SAF”) yang menjadi

petunjuk pelaksanaan & tindakan dalam pengendalian *fraud* melalui serangkaian proses kegiatan yang dikenal sebagai Catur Pilar Strategi Anti Fraud (“CPSAF”) yang mencakup kegiatan:

- 1) pencegahan;
- 2) pendeteksian;
- 3) investigasi /pelaporan & sanksi;
- 4) pemantauan /evaluasi & tindak lanjut.

Perusahaan telah menyiapkan saluran *whistleblowing* melalui nomer *Whatsapps* (“WA”) khusus dan alamat *e-mail* sebagai saluran untuk menyampaikan informasi mengenai kejadian *fraud* yang terjadi dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Berdasarkan data dari UKAF, sepanjang tahun 2024 tidak terdapat kasus atau kejadian *fraud* yang terjadi dalam operasional Perusahaan dan tidak ada kasus atau kejadian *fraud* yang masih belum terselesaikan.

Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Layanan Pengaduan Debitur (“LPD”) sebagai bentuk komitmen untuk menangani pengaduan yang diterima dari Debitur. Pelaksanaan penanganan pengaduan debitur ini berdasarkan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Satuan Kerja LPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penyelesaian yang adil atas pengaduan yang disampaikan Debitur dan sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak Debitur. Dan sebagai pedoman pelaksanaan LPD, Perusahaan telah menyusun mekanisme penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan Debitur. Berdasarkan data dari Satuan Kerja LPD, sepanjang tahun 2024, Perusahaan belum menerima pengaduan dari Debitur dan tidak ada sisa pengaduan Debitur yang belum terselesaikan.

## 5.4. Pendekatan pemangku kepentingan

Perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, penentuan strategi dan penerapan KB. Pemetaan dan identifikasi keterlibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

| Pemangku Kepentingan                 | Topik  | Metode Pelibatan   | Frekwensi Pendekatan  | Respon Perusahaan  |
|--------------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Calon debitur/ Debitur</b>        | Sosialisasi produk/jasa pembiayaan yang jelas dan transparan                 | Kantor Pusat, Telepon, <i>E-mail dan Website</i>   | Jam operasional, alamat e-mail dan akses website  | Menyampaikan informasi produk/jasa pembiayaan  |
|                                      | Penjelasan mengenai produk/jasa pembiayaan yang diperoleh                    | <i>RIPLAY di website, Face to face saat survey, Perjanjian Pembiayaan dan Welcoming Letter</i> | Akses website, Proses survey dan saat persetujuan pembiayaan                                    | Menyampaikan informasi detail mengenai produk/jasa pembiayaan yang diperoleh   |
|                                      | Kemudahan akses  | Telepon, <i>E-mail</i> dan peran Satuan Kerja Pemasaran  | Jam operasional, alamat e-mail dan akses website  | Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi dari Calon debitur/Debitur  |
|                                      | Layanan Pengaduan Debitur ("LPD")  | Telepon dan <i>E-mail</i> PIC Satuan Kerja LPD   | Jam operasional   | Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi pengaduan dari Debitur  |
| <b>Pemegang Saham</b>                | Penyampaian informasi dan kinerja keuangan dan/atau non keuangan akhir tahun | Pelaporan Kinerja dan RUPS   | Kuartal dan tahunan   | Melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan   |
|                                      | Kegiatan/aktivitas penting lainnya   | Pelaporan kegiatan/aktivitas penting   | Setiap ada kegiatan/aktivitas penting   | Menyampaikan rencana dan laporan kegiatan/aktivitas penting  |
| <b>Regulator</b>                     | Kepatuhan peraturan dan perundang-undangan                                   | Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan ("RBT") dan Laporan Realisasi                               | RBT 1 tahun sekali & Laporan realisasi 2 kali setahun   | Menyusun RBT dan laporan-laporan yang diwajibkan Regulator sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan   |
|                                      |  | Menyusun RAKB dan Laporan Berkelanjutan  | 1 tahun sekali  |  |
|                                      |  | Penyampaian laporan lainnya yang diwajibkan Regulator sesuai jadwal yang telah ditentukan      | Sesuai jadwal yang ditetapkan Regulator   |  |
| <b>Pemasok/ Mitra Kerja</b>          | Hubungan bisnis yang saling menguntungkan                                    | Sosialisasi kebijakan mengenai hubungan dengan pemasok   | Minimal 1 tahun sekali  | Menyusun perjanjian kerjasama dengan pemasok/mitra kerja dalam penyediaan barang/jasa.   |
|                                      | Proses pengadaan barang/jasa yang adil dan transparan                        |  |   |  |
| <b>Karyawan</b>                      | Pemenuhan hak karyawan<br>Kesempatan pengembangan diri dan karir             | Media Internal ( <i>E-mail, Internal Memo, Internal Meeting</i> ) dan Evaluasi Tahunan         | Setiap ada informasi yang disampaikan kepada karyawan dan 1 tahun sekali untuk Evaluasi Tahunan | Sosialisasi kebijakan kepada karyawan  |
|                                      | Proses rekrutmen<br>Pengalaman bekerja yang berharga                         |  |   |  |
| <b>Komunitas dan/atau Masyarakat</b> | Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat                                     | Pertemuan dengan komunitas/masyarakat dan Program Literasi Keuangan                            | Minimal 2x dalam 1 tahun  | Memberikan literasi dan pengetahuan mengenai keuangan, produk/jasa Perusahaan dan berbagai info yang menarik dan produktif bagi masyarakat |

### **5.5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan KB**

Secara internal penerapan KB sepanjang tahun 2024 telah dijalankan seiring dengan kegiatan operasional Perusahaan. Pemahaman dan kesadaran (*awareness*) karyawan sudah meningkat namun masih perlu terus dikembangkan lagi agar dapat memberikan dampak positif dalam penerapan KB.

Tantangan yang masih harus dipelajari dan diselesaikan adalah melakukan identifikasi dan klasifikasi sektor usaha Calon debitur/Debitur yang sesuai dengan kriteria KB. OJK telah menyusun dan mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (“THI”) edisi 1.0 dan telah ditingkatkan menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (“TKBI”) sebagai standarisasi definisi dan kriteria hijau. TKBI ini perlu dipelajari lebih lanjut untuk mendukung penerapan KB. Selain itu, penerapan KB masih perlu dilakukan sosialisasi yang konsisten kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dan Debitur/Calon debitur.

## **6. Kinerja berkelanjutan**

### **6.1. Membangun budaya berkelanjutan**

Dalam melaksanakan penerapan KB secara konsisten diperlukan adanya budaya keberlanjutan. Membangun budaya keberlanjutan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terarah. Struktur tata kelola perusahaan yang baik dan kompetensi SDM yang memadai diperlukan untuk membangun budaya keberlanjutan. Jadi, upaya terus menerus dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan juga peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perlu dilakukan.

Perusahaan bukanlah perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi, namun dalam melaksanakan kegiatan operasional tetap menggunakan energi listrik yang saat ini sebagian besar masih berasal dari energi fosil dan kertas yang berasal dari bahan baku pohon. Jadi, Perusahaan memandang bahwa pola kerja hemat energi listrik dan kertas akan memberikan dampak pada penurunan emisi GRK. Pola kerja hemat energi listrik dan kertas dapat dilakukan semua pihak dan merupakan kontribusi dan andil Perusahaan dalam penurunan emisi GRK.

### **6.2. Kinerja aspek ekonomi**

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan dari OJK tahun 2024, sampai Desember 2024, realisasi total aset seluruh perusahaan pembiayaan mencapai sebesar Rp. 588.935.576 juta atau naik 6,52% dibandingkan realisasi total aset tahun 2023. Sedangkan pada periode yang sama, realisasi piutang pembiayaan sebesar Rp. 503.427.622 juta atau naik 6,92% dibandingkan realisasi piutang pembiayaan tahun 2023. Data ini menunjukkan dalam kondisi eksternal yang cukup menantang, industri perusahaan pembiayaan tetap dapat bertumbuh secara positif.

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah menyalurkan piutang pembiayaan pada sektor ekonomi yang telah dipahami dan dilayani dengan baik. Dan sampai akhir Desember 2024, Perusahaan membukukan realisasi total aset sebesar Rp. 112.550 juta atau naik 1,03% dibanding realisasi total aset tahun 2023. Sedangkan realisasi piutang pembiayaan sebesar Rp. 58.737 juta atau naik 19,74% dibandingkan realisasi piutang pembiayaan tahun 2023. Melalui kegiatan usaha pembiayaan tahun 2024, Perusahaan membukukan realisasi total pendapatan sebesar Rp. 6.819 juta atau turun 6,18% dibanding realisasi total pendapatan tahun 2023 dan realisasi laba komprehensif tahun 2024 sebesar Rp. 1.236 juta atau turun 42,62% dibandingkan realisasi laba komprehensif tahun 2023.

Adapun perbandingan pencapaian beberapa indikator keuangan dan rasio-rasio penting adalah sebagai berikut:

| Deskripsi (Dalam Rp. Juta)                               | 2024    | 2023    | 2022    |
|--|---------|---------|---------|
| <b>Laporan posisi keuangan &amp; laba rugi</b> (Rp.juta) |         |         |         |
| Total aset   | 112.550 | 111.408 | 109.341 |
| Piutang pembiayaan                                       | 58.737  | 49.053  | 56.576  |
| Total pendapatan   | 6.819   | 7.268   | 5.573   |
| Laba komprehensif tahun berjalan neto                    | 1.236   | 2.154   | 1.046   |
| <b>Rasio-2 keuangan</b> (%)                              |         |         |         |
| Return on Asset ("ROA")                                  | 1,15    | 1,97    | 0,88    |
| Return on Equity ("ROE")                                 | 1,15    | 1,98    | 0,92    |
| Non Performing Financing ("NPF")                         | -       | -       | -       |
| Financing to Asset Ratio ("FAR")                         | 52,19   | 44,03   | 51,74   |
| Beban Ops terhadap Pendapatan Ops ("BOPO")               | 127,99  | 101,24  | 106,78  |

### 6.3. Kinerja aspek sosial

Sebagai komitmen terhadap penerapan KB, Perusahaan mempunyai kewajiban menyediakan dan menawarkan produk/jasa pembiayaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan produk/jasa pembiayaan yang setara kepada seluruh Debitur/Calon debitur dan masyarakat. Kesetaraan Layanan tersebut diwujudkan dengan memberikan informasi secara memadai mengenai produk/jasa pembiayaan, fitur atau program kepada Debitur/calon debitur melalui media-media yang terjangkau bagi Debitur/Calon debitur dan masyarakat antara lain *Website*, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("RIPLAY"), *E-mail*, brosur, atau media lainnya yang dapat diakses masyarakat.

#### 6.3.1. Ketenagakerjaan

Karyawan adalah salah satu pemangku kepentingan yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional Perusahaan sehingga perlu diatur suatu hubungan kerja yang baik dan sesuai ketentuan. Jadi, Perusahaan akan selalu mendasarkan dan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu implementasi bentuk kepatuhan yang dilakukan adalah tidak adanya rekrutmen pekerja anak dan juga berlakunya jam kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kesempatan kerja dan pengembangan diri, Perusahaan selalu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada

siapapun yang memiliki kompetensi yang sesuai dan integritas yang tinggi, menjunjung etos kerja yang tinggi dan kejujuran.

Perusahaan telah memastikan semua hak karyawan dipenuhi secara memadai dengan memberikan remunerasi berdasarkan kebijakan perusahaan dan kinerja karyawan. Seluruh karyawan telah menerima remunerasi yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (“UMR”). Perusahaan secara terus menerus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan agar dapat mencapai prestasi dan kinerja terbaik melalui pelatihan/training dan atau seminar/webinar yang dilaksanakan oleh OJK, Regulator, APPI maupun lembaga-lembaga pendidikan terkemuka yang mempunyai kompetensi baik. Seluruh karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan.

### **6.3.2. Masyarakat**

Perusahaan memiliki 1 (satu) kantor pusat yang merangkap kantor operasional di Jakarta dengan cakupan area operasional di area Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung. Kegiatan usaha dan pelayanan Debitur/Calon debitur masih dapat dilaksanakan melalui jaringan kantor yang tersedia dan Perusahaan belum memiliki rencana untuk membuka Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”).

Perusahaan terus berkomitmen berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Tahun 2024, kegiatan ini telah dilaksanakan secara *offline* atau tatap muka secara langsung dengan partisipan yang terdiri dari siswa/wi Sekolah Cakra Buana di Depok, Jawa Barat. Tema literasi keuangan yang disampaikan adalah “Menjadi Konsumen yang Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Fasilitas Dana Pembiayaan”. Partisipan yang hadir dan mengikuti kegiatan literasi keuangan sebanyak 72 orang siswa/wi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respon yang positif dari pihak sekolah dan partisipan para siswa/wi karena mendapatkan wawasan baru mengenai industri keuangan khususnya perusahaan pembiayaan dan pengelolaan keuangan.

Terkait pengaduan dari masyarakat mengenai aspek sosial dan lingkungan hidup, Perusahaan belum menyediakan mekanisme dan media khusus. Namun demikian, sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab kepada masyarakat, Perusahaan menyediakan media untuk menyalurkan pengaduan melalui saluran sebagai berikut:

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Telepon</b> | (021)29667879  |
| <b>E-mail</b>  | <a href="mailto:tufjkt@thetempogroup.com">tufjkt@thetempogroup.com</a> |

Untuk saluran *whistleblowing*, Perusahaan juga telah menyediakan saluran sebagai berikut:

|               |  |
|---------------|--|
| <b>WA</b>     | 085846343912   |
| <b>E-mail</b> | <a href="mailto:tufjkt@thetempogroup.com">tufjkt@thetempogroup.com</a><br>Up. Anti Fraud |

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Perusahaan juga menerima saran ataupun pengaduan dari Debitur/Calon debitur. Dan untuk menangani pengaduan tersebut, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan pedoman dan mekanisme penanganan pengaduan Debitur yang dituangkan dalam SOP Layanan Pengaduan Debitur.

#### 6.4. Kinerja aspek lingkungan hidup

Meskipun kegiatan operasional Perusahaan bukan merupakan kegiatan yang secara langsung membahayakan ataupun berpotensi merusak lingkungan hidup namun, Perusahaan tetap memberikan komitmen untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan operasional sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dalam melakukan kegiatan operasional, Perusahaan menggunakan energi listrik dan kertas. Energi listrik yang dikonsumsi tersebut sebagian besar masih berasal pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil dan kertas berasal dari bahan baku pohon sehingga Perusahaan mengupayakan kegiatan operasional yang ramah terhadap lingkungan hidup melalui pola kerja hemat energi listrik dan kertas sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, penebangan pohon dan akhir juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas udara melalui penurunan polusi udara.

Penggunaan energi listrik paling banyak dalam kegiatan operasional Perusahaan adalah perangkat penerangan ruangan dan peralatan elektronik yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada Calon debitur/Debitur. Sepanjang tahun 2024, realisasi jumlah energi listrik yang dikonsumsi Perusahaan berdasarkan data tagihan Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) sebesar 5.876 Kwh atau turun 13,13% dibandingkan realisasi tahun 2023. Sebagai perbandingan, berikut ini realisasi jumlah energi listrik yang dikonsumsi dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

|   | 2024  | 2023  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|
| Realisasi konsumsi energi listrik (Kwh) | 5.876 | 6.764 | 8.151 |

Perusahaan secara mandiri melakukan perhitungan estimasi emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan usahanya dengan menggunakan referensi Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi GRK Sektor Berbasis Energi yang dikeluarkan Bappenas tahun 2014. Berdasarkan data konsumsi energi listrik diatas, maka Perusahaan menghitung estimasi emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan usaha pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

|  | 2024 | 2023  | 2022  |
|--|------|-------|-------|
| Estimasi emisi GRK yang dihasilkan (KgCO2) |      | 4.904 | 5.910 |

Sedangkan realisasi pembelian kertas pada kegiatan usaha Perusahaan tahun 2024 sebanyak 56.943 lembar kertas atau turun 10,19% dibandingkan realisasi pembelian kertas tahun 2023. Perusahaan akan terus mengupayakan pola dan sistem kerja yang dapat mengurangi penggunaan kertas.

## 7. Referensi Lampiran II POJK No.51/POJK.03/2017

| No | Pengungkapan   | Halaman |
|----|--|---------|
| 1  | Penjelasan Strategi berkelanjutan  | 1       |
| 2  | Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan   |         |
|    | a. Aspek Ekonomi   | 3       |
|    | b. Aspek Sosial  | 3       |
|    | c. Aspek Lingkungan hidup  | 3       |
| 3  | Profil singkat Perusahaan  |         |
|    | a. Visi Misi keberlanjutan   | 4       |
|    | b. Nama, Alamat, Nomer telepon, Alamat surat elektronik ( <i>E-mail</i> ) dan <i>Website</i> Perusahaan  | 5       |
|    | c. Skala usaha Perusahaan  | 5       |
|    | d. Penjelasan singkat produk/jasa pembiayaan   | 6       |
|    | e. Keanggotaan dalam Badan/Asosiasi  | 7       |
| 4  | Penjelasan Direksi   |         |
|    | a. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberlanjutan   | 8       |
|    | b. Penerapan keuangan berkelanjutan  | 9       |
|    | c. Strategi pencapaian target  | 10      |
| 5  | Tata kelola berkelanjutan  |         |
|    | a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan  | 11      |
|    | b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan                            | 12      |
|    | c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris | 13      |
|    | d. Penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan  | 15      |
|    | e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan   | 16      |
| 6  | Kinerja berkelanjutan  |         |
|    | a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya berkelanjutan di internal Perusahaan  | 17      |
|    | b. Uraian mengenai kinerja ekonomi 3 (tiga) tahun terakhir   | 17      |
|    | c. Kinerja sosial 3 (tiga) tahun terakhir  | 18      |
|    | d. Kinerja lingkungan hidup bagi Perusahaan  | 20      |

